

KIK
Day 15/01
Sud
t

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU
TERTENTU PADA PERSEROAN TERBATAS MERMAID TEKSTIL
INDUSTRI INDONESIA SIDOARJO**

SKRIPSI



OLEH :

SUDIONO

NIM : 039610153-U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2001**

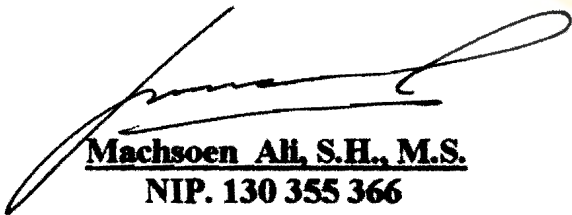
**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU
TERTENTU PADA PERSEROAN TERBATAS MERMAID TEKSTIL
INDUSTRI INDONESIA SIDOARJO**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130 355 366



Sudiono
NIM. 039610153 U

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan bab sebelumnya berkaitan dengan kesepakatan kerja untuk waktu tertentu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu pada PT Mermaid Tekstil Industri Indonesia Sidoarjo khususnya bagi pekerja wanita yang dibuat dengan sistem kontrak tahunan dengan masa kerja lebih dari tiga tahun tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena kontrak tersebut dibuat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Permenaker No. PER-02/MEN/1993, yang membatasi masa kontrak kerja tidak lebih dari 3 tahun. Perjanjian yang dibuat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perjanjian atau kontrak tersebut menjadi batal demi hukum.
- a. Pekerja wanita yang terikat perjanjian kerja untuk waktu tertentu dengan sistem kontrak tahunan dapat apabila pekerja selalu dalam status pekerja kontrak setelah masa kerja mencapai 3 tahun dapat mengajukan penyelesaian melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Peburuhan Pusat, karena menyangkut kerja secara massal.

2. Saran

Hendaknya PT MTII meninjau ulang kesepakatan kerja untuk waktu tertentu yang telah dibuat tersebut dengan mendasarkan pada pasal 8 Permenaker No. PER-02/MEN/1992.

Pekerja hendaknya menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum agar hak-haknya dilindungi melalui menggugat atas dasar perbuatan melanggar hukum terhadap pengusaha PT MTII.

